

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN 2018



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHSTIAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas pokok dan Fungsi DLHK Kabupaten Berau	2
1.3 Struktur dan organisasi	3
1.4 Struktur Organisasi.....	7
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 RENCANA STRATEGIS	20
2.1.1 Visi dan Misi	20
2.1.2 Tujuan dan sasaran	23
2.1.3 Kebijakan, Strategis, Arah Kebijakan dan Program	24
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	34
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	38
2.4 Perjanjian Kinerja	47

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	49
3.1	Pencapaian Kinerja Organisasi	49
3.2	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	51
3.3	Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	54
3.3.1	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan	55
3.3.2	Membandingkan antara realisasi kinerja tahun lalu dan Kinerja tahun ini	56
3.3.3	Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka Menengah yang terdapat pada dokumen strategis	57
3.3.4	Analisa penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan Kinerja	59
3.3.5	Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	59
3.3.6	Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	60
3.4	Realisasi Anggaran	63
BAB IV	PENUTUP.....	67

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

- Perjanjian Kinerja
- Rencana Kinerja
- Pengukuran Kinerja

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya sehingga laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2018 dapat disusun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republic Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah pada lampiran II penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Bertujuan untuk dapat mengukur dan meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara optimal dan terpadu antara program kegiatan

Disadari bahwa penyusunan LKJ-IP ini masih banyak belum sempurna karenanya saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan kedepan

Kami sangat berharap kinerja yang telah tercapai dapat terus dipertahankan dan yang masih belum memenuhi target dapat ditingkatkan daya dukung dan sumber daya manusia yang memadai

Akhirnya kami mengharapkan agar laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini dapat dimanfaatkan dan dipergunakan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan barokah dan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin.

Kepala

**Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan**

H. Sujadi, A.Pi
NIP. 19631121 199003 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah Kabupaten Berau adalah Pembangunan Masyarakat Kabupaten Berau seutuhnya yang mana hasilnya dinikmati langsung seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Berau.

Guna melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan hati nurani rakyat, maka dipandang perlu untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini guna meningkatkan keserasian antara pelaksanaan pembangunan dengan aspek lingkungan.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sangat diperlukan sehubungan dengan tugasnya sebagai koordinator Perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi DLHK Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, didalamnya terdapat Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHK Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

- e. Pelaksanaan UPTD.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Terjaganya kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau)
- Terjaganya kualitas udara
- Menurunnya intensitas emisi
- Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau

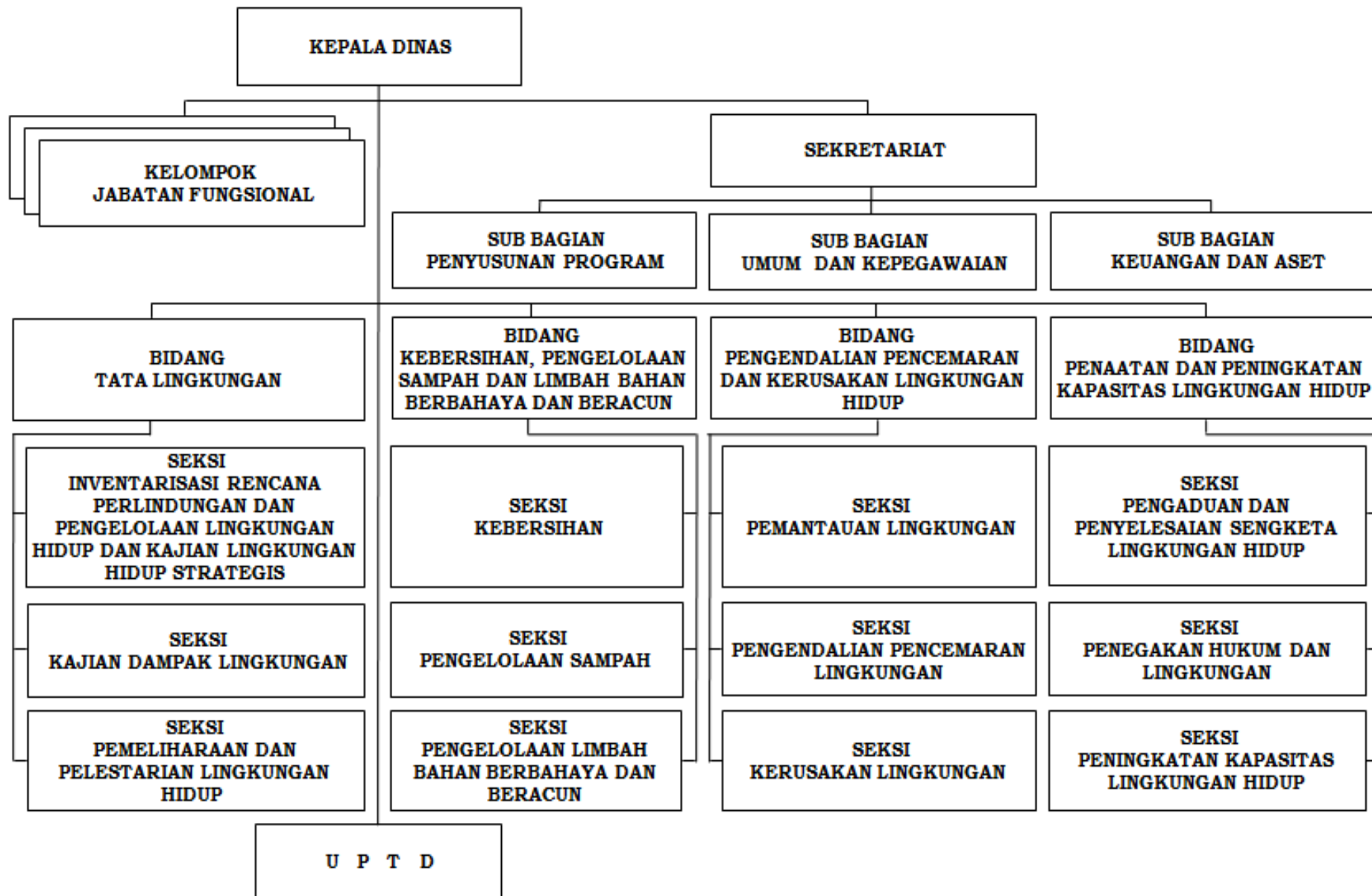
Dari tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis pembangunan Kabupaten Berau.

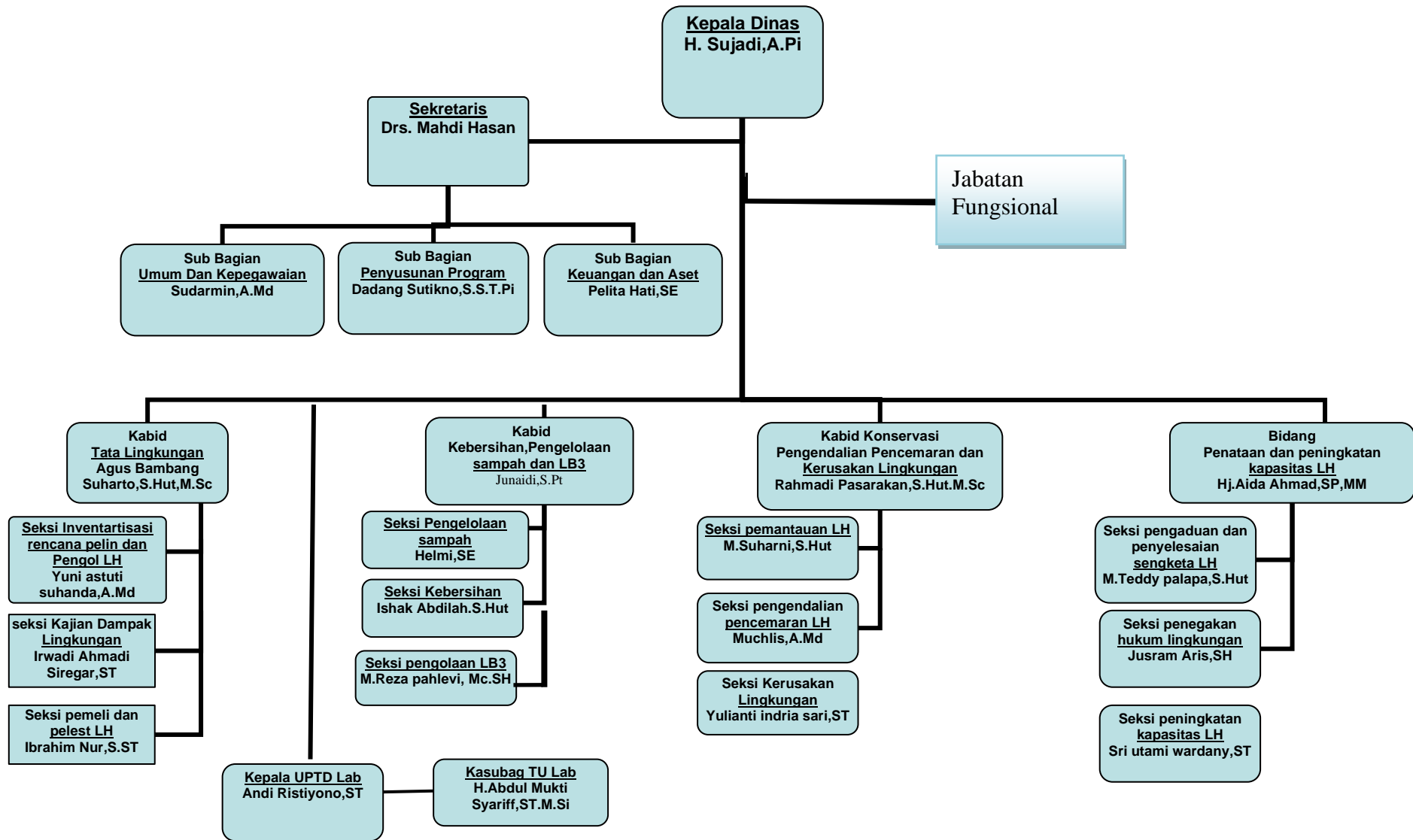
1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program
 - Sub Bagian Keuangan dan aset.
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahi :
 - Seksi inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH dan KLHS
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian LH

- d. Bidang kebersihan, Pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi :
- Seksi Kebersihan
 - Seksi pengelolaan Sampah
 - Seksi Pengelolaan LB3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
- Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - Seksi Kerusakan Lingkungan;
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan;
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. UPTD
- UPTD Laboratorium Lingkungan
 - UPTD Kebersihan Pulau Derawan dan Pulau Maratua
 - UPTD Kebersihan Talisayan
 - UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:





1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil berjumlah 80 orang, dimana 66 orang diantaranya adalah laki – laki dan 14 orang diantaranya perempuan. Berdasarkan golongan,

Tabel 1 Jumlah pegawai / Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Yang Tersusun Dengan Kriteria Gender.

No	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kabid	3	1	4
4.	Kepala UPTD	1	-	1
5.	Kasubbid	9	3	12
6.	Kasubbag	3	1	4
7.	Staf	48	9	57
	total	66	14	80

Jumlah terbanyak PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah Golongan II yang berjumlah 28 orang atau 35 % dari jumlah keseluruhan pegawai. Berikut Tabel Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau berdasarkan Golongan dan Gender

Tabel 2 . Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender

Golongan	Gender		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
IV	6	1	7
III	18	9	27
II	28	0	28

I	14	4	18
JUMLAH	66	14	80

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2018

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Gender Pegawai

pendidikan	Gender		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
STRATA 3	0	0	0
STRATA 2	3	1	4
STRATA 1/D IV	16	7	23
DIPLOMA III	4	1	5
DIPLOMA II	0	0	0
DIPLOMA I	0	0	0
SLTA	28	3	31
SLTP	10	0	10
SD	5	2	7
JUMLAH	66	14	80

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2018

Dari jumlah tenaga kerja yang ada di DLHK masih terdapat kekurangan tenaga kerja terutama pada Bidang kebersihan dan UPTD yang ada.

Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2018 sarana kerja yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel.4 Sarana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau

No.	Sarana Kerja	Jumlah

1.	Gedung Kantor	4 Bangunan
2.	Kendaraan roda 4	10 unit
3.	Kendaraan roda 2	13 unit
4.	Excavator	2 Unit
5.	Well loder	1 unit
6.	Kendaraan roda 6	21 unit
4.	pH Meter	1 unit
5.	TDS meter	1 unit
6.	AAS	1 Unit
7.	AC	10 Unit
8.	Laptop/Note Book	5 unit
9.	Komputer (PC)	19 unit
10.	Handy Cam	1 unit
11.	Printer	19 unit
12.	Telephone (PABX)	1 unit
13.	Faksimile	1 unit
14.	TV	6 Unit
15.	Sound System	2 Unit
16.	Meja kerja	66 Unit
17.	Sofa	1 set
18.	Alat-alat Laboratorium LH	1 paket
19.	Kursi dan meja Ruang Rapat	50 kursi dan 10 meja panjang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2018

Dari tabel saranan dan prasaranan masih terdapat kekurangan terutama kendaraan operasional dilapangan, Leptop dan bangunan kantor serta fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan

1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan dan Kebersihan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance*. Dalam lima tahun kedepan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengedepankan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau yaitu :

1. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup

Berbagai potensi sumber daya alam di Kabupaten Berau dapat dimanfaatkan sebagai penunjang maupun dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara cuma-cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa

lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, dan keserakahan.

Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam di lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini:

a. Terus menurunnya kondisi hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian wilayah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem wilayah. Berdasarkan hasil telaah *World Agro Forestry Center dan The Nature Conservancy (TNC)* pada tahun 2009 saja atau selama periode 1990 sampai 2008 sekitar 39.000 hektar Hutan Berau mengalami kerusakan akibat deforestasi dan degradasi serta menghasilkan emisi karbon dioksida lebih dari 20 juta ton.

Meningkatnya kerusakan itu masih akan terus terjadi seiring tingginya ambisi perusahaan-perusahaan tambang yang ada untuk mencapai target produksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Ancaman lain terhadap hutan Berau cukup tinggi jika pembangunan tidak dilakukan dengan bijaksana. Dengan dinamika pembangunan dan kegiatan penambangan yang semakin meningkat, maka kuantitas hutan mulai menurun. Tak hanya itu, komitmen perusahaan juga saat ini semakin menurun.

b. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang tinggi dan beragam di Indonesia. Di wilayah laut kabupaten ini terdapat terumbu karang yang luas dengan kondisi cukup baik. Keragaman terumbu karang Berau tertinggi kedua di Indonesia setelah Raja Ampat dan ketiga di

dunia. Hutan *mangrove* ditemukan di Delta Berau dan di sepanjang daerah pesisir. Sejumlah pulau-pulau kecil dan ekosistem padang lamun juga terdapat di daerah ini. Beberapa spesies yang dilindungi dapat ditemukan seperti penyu, paus, lumba lumba, duyung dan beberapa spesies lainnya. Perairan Berau dikenal sebagai wilayah yang memiliki habitat penyu hijau terbesar di Indonesia. Selain itu, potensi perikanan dan pariwisatanya masih baik. Namun demikian, di kawasan pesisir dan laut Berau juga terdapat berbagai permasalahan seperti perusakan terumbu karang, penurunan populasi penyu, praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya.

Kerusakan daerah pesisir dan indikasi perkembangan Delta Sungai Mahakam dan Berau ke arah lepas pantai, erat sekali hubungannya dengan kegiatan di daratan Kalimantan timur terutama eksploitasi kayu secara liar (*illegal logging*) dan penebangan hutan *mangrove* di daerah pesisir yang makin lama tidak terkontrol. Selain itu, kendati masuk ke dalam salah satu tujuan wisata bawah laut kelas dunia, Kabupaten Berau masih harus berlutut dengan maraknya penggunaan bom dan racun ikan yang digunakan oleh nelayan setempat. Saat ini kerusakan terumbu karang yang masuk dalam Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau mencapai 60% dari luas total sebesar 480.000 hektare. Ini salah satunya diakibatkan oleh cara menangkap ikan dengan bahan kimia dan bom, selain karena faktor alam. "Kita perkirakan kerusakannya sudah 60%. Memang tidak semua karena manusia, juga karena pemanasan global," ujarnya. Sebanyak 12 pulau yang masuk dalam Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau, Kalimantan Timur dengan luasan 1,2 juta ha, diperkirakan sebanyak 40 persen atau 480.000 ha merupakan kawasan terumbu karang. Terumbu Karang Berau memiliki ribuan jenis terumbu karang dan puluhan ribu keanekaragaman hayati mendiami pulau itu, termasuk penyu hijau.

Dengan potensi sumberdaya pesisir dan laut yang besar beserta permasalahannya, wilayah pesisir dan laut Kabupaten Berau perlu dikelola dengan baik dan tepat. Hal ini guna menjaga kelestarian dan

berjalannya fungsi dari sumberdaya tersebut sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

c. Citra pertambangan yang merusak lingkungan

Aktivitas pertambangan di Berau yang mempunyai potensi merusak lingkungan jika tidak diatur, diawasi dan dikelola dengan bijak. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (open pit mining), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat dapat merusak lingkungan.

d. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*)

Kabupaten Berau termasuk daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kekayaan tersebut terletak baik di perairan maupun daratan. Keanekaragaman hayati flora dan fauna akuatik di Kabupaten Berau yang banyak dijumpai di perairan atau kawasan laut kepulauan Derawan meliputi *mangrove*, lamun (*seagrass-meadows*), terumbu karang, ikan karang, Cetacean dan Manta Rays (kelompok paus dan lumba-lumba), penyu, ubur-ubur, biota lainnya (decapoda, alga, plankton, gastropoda, benthik foraminifera).

Keanekaragaman hayati flora dan fauna daratan di Kabupaten Berau banyak dijumpai di hutan, dan hasil survei fauna darat menunjukkan telah ditemukan sebanyak 42 jenis mamalia, 108 jenis burung, 6 jenis reptil, 9 jenis amphibi, 35 jenis ikan air tawar dan 14 jenis nyamuk. Fauna mamalia terdiri dari 4 jenis primata, 10 jenis rodentia, 3 jenis tupai, 3 jenis kucing, 4 jenis tikus, 9 jenis kelelawar dan 9 jenis mamalia lainnya. Bekantan dan orang utan termasuk mamalia dan merupakan endemik Pulau Kalimantan, sedangkan 13 jenis mamalia yang termasuk kategori dilindungi, yaitu beruang madu, garangan, kancil, kukang, kijang kuning, kucing hutan, landak, macan dahan,

musang hitam, muncak, pelanduk napu, rusa, dan trenggiling. Fauna burung (avifauna) diantaranya adalah beo atau tlung (*Gracula religiosa*), elang bondol (*Hallaster indus*), burung raja udang (*Alcedo meninting*) yang merupakan avifauna kategori dilindungi. Sedangkan reptil kategori dilindungi adalah ular sawa (*Phyton molurus*), dan 3 jenis amphi.

Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut akan hilang jika tidak dilindungi dan dipelihara dengan bijak.

e. Pencemaran air semakin meningkat

Salah satu penyebab pencemaran air adalah aktifitas tambang yang tidak ramah lingkungan. Aktifitas tambang batubara di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara tambang terbuka, walaupun ada beberapa yang menggunakan tambang bawah tanah (*underground mining*), sehingga akan berdampak terhadap perubahan bentang alam, sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, serta secara umum menimbulkan kerusakan pada permukaan bumi. Dampak ini secara otomatis akan mengganggu ekosistem di atasnya, termasuk tata air (Subardja, 2007). Menurut Sayoga (2007) permasalahan lingkungan dalam aktivitas pertambangan batubara umumnya terkait dengan Air Asam Tambang (AAT) atau *Acid Mine Drainage* (AMD). Air tersebut terbentuk sebagai hasil oksidasi mineral sulfida tertentu yang terkandung dalam batuan oleh oksigen di udara pada lingkungan berair. Pestisida dan herbisida yang berlebih dari perkebunan kelapa sawit juga berpotensi mencemari sungai. Pengelolaan limbah yang kurang baik (membuang langsung ke sungai) mengakibatkan air tercemar, kotor, dan bau yang efeknya berbahaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Marganingrum dan Noviardi (2010) diketahui bahwa aktifitas tambang secara langsung maupun tak langsung mencemari air. Hasil analisis data yang diperoleh baik di lapangan maupun analisis laboratorium, baik dari sampel air maupun sampel tanah, menunjukkan bahwa keasaman air di sepanjang Sungai Lati lebih disebabkan oleh faktor lingkungan di sekitar penambangan batubara, daripada pencemaran dari limbah hasil pengolahan batubara. Hal ini ditunjukkan dengan pH sampel air

dari outlet pengolahan sebesar 6,3 pada saat hujan dan 9,7 pada saat tidak hujan. Setelah mendapatkan masukan dari aliran sungai yang berasal dari disposal (A5), pH Sungai Lati kembali turun pada nilai 4. Oleh karena itu pengelolaan lahan bekas tambang perlu dilakukan secermat mungkin untuk menghindari kontak dengan udara dan air dari luar. Untuk meminimalisir polutan dari lokasi bekas tambang ataupun tanah disekitar penambangan batubara yang kaya akan mineral sulfide.

f. Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun

Pencemaran udara di Kabupaten Berau lebih disebabkan adanya pembakaran lahan yang rutin dilakukan masyarakat tiap tahunnya. Kualitas udara di Tanjung Redeb semakin menurun saat musim tanam tiba atau pembukaan lahan. Ini tidak lain akibat gangguan asap tebal yang mengurung langit akibat pembakaran lahan. Hal ini tentu memerlukan suatu pengaturan dan pemahaman kepada masyarakat serta perlu segera diambil langkah antisipasi agar kedepannya tidak terjadi hal seperti ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencans Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan Peluang dan inovasi. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan konsisten dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah yang lebih baik. Khususnya meningkatkan kualitas lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi dan misi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA
SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
BERKELANJUTAN**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan memengaruhi peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat penting dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumensarana dan prasarana publik juga perlu mendapat kepastian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memerhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola secara transparan dan partisipatif; serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacupada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Mempertahankan kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup sangat memengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi pertama yaitu “Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Terjaganya kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau)
- Terjaganya kualitas udara
- Menurunnya intensitas emisi
- Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani

2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Berau mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Strategi Pembangunan Tahun 2016-2021

Strategi	Sasaran
1. Menurunkan pencemaran air dari sumbernya	Terjaganya kualitas air sungai (sungai seghah, kelay, Berau)
2. Pengendalian pencemaran udara	Terjaganya kualitas udara
3. Pengurangan emisi GRK berbasis lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan)	Menurunnya intensitas emisi
4. Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau

1. Menurunkan pencemaran air dari sumbernya

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau dalam strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah dengan menurunkan pencemaran air dari sumbernya. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup harus memperhatikan kualitas air demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu disadari bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil perlu dilaksanakan agar keseimbangan integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian dilakukan dengan mengnyinergikan peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian terutama yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko perubahan ekosistem dengan dampak negatif maupun positif. Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu dan teknologi yang tidak digunakan dengan benar adalah terjadinya polusi (pencemaran). Polusi merupakan peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen lain yang merugikan kedalam lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alami. Oleh karena itu tranformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi serta resiko bencana.

2. Pengendalian pencemaran udara

Masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Berau saat ini di dominasi perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.

Pencemaran udara merupakan salah satu dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Berau. Laju urbanisasi yang tinggi, motorisasi dan industrialisasi telah menyebabkan permasalahan pencemaran udara yang menyebabkan pencemaran udara menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap kesehatan masyarakat, masyarakat miskin perkotaan, dan produktivitas nasional.

Semakin peliknya masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Berau menyebabkan kekhawatiran berbagai pihak akan akan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang. Udara banyak mengandung polutan, penipisan lapisan ozon yang bisa mengganggu ekosistem bumi dan efek rumah kaca. Selain disebabkan oleh faktor alam, pencemaran udara lebih banyak disebabkan oleh manusia, misalnya dari kendaraan bermotor, kegiatan industri dan sebagainya. Selain dapat membahayakan lingkungan, pencemaran udara juga dapat membahayakan kesehatan manusia.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran udara yang lebih lanjut hendaknya dilakukan pengendalian pencemaran udara dengan menjaga kebersihan udara dan meminimalkan pencemaran udara, misalnya tidak memakai kendaraan bermotor yang sudah tua, tidak membuang gas yang berbahaya secara sembarangan terutama bagi kegiatan industri, dan lain sebagainya agar kebersihan udara Kabupaten Berau tetap terjaga.

3. Pengurangan emisi GRK berbasis lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan)

Isu perubahan iklim yang semakin hari menjadi isu yang sangat penting untuk ditangani, tidak terlepas dari dampaknya yang dirasakan oleh bangsa Indonesia termasuk di Kabupaten Berau. Posisi geografis Kabupaten Berau yang terletak di daerah tropis dan kepulauan menjadikan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memandatkan bahwa dalam melakukan pemeliharaan lingkungan hidup diperlukan upaya diantaranya dengan carapelestarian fungsi atmosfer melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam rangka menurunkan emisi GRK, Indonesia secara sukarela telah menetapkan target nasional dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% dari *bussiness as usual* pada tahun 2020. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK secara global.

Pemerintah Kabupaten Berau harus melakukan berbagai kegiatan nasional dan sektoral yang dapat mempercepat pencapaian target penurunan

emisi GRK seperti program berbasis lahan seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan serta pemanfaatan teknologi energi bersih, pengurangan pemakaian BBM bersubsidi, khususnya dengan gas dan energi terbarukan, program konservasi energi dan lain-lain.

Sinergitas kebijakan lintas Kementerian dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk dapat mendorong pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Untuk itu, masyarakat sudah harus bergerak ke dalam kegiatan konkrit yang berwawasan lingkungan.

4. Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani

Pengolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan sampah. Kehadiran sampah sebagai buangan dari aktifitas domestic, komersial maupun industry tidak bisa dihindari bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya sejalan dengan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu.

Penangan sampah di Kabupaten Berau dilakukan dengan mengangkut sampah dari TPS dan dari rumah – rumah kemudian di buang ke TPA (tempat pembuangan Akhir)

Berdasarkan uraian tersebut pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan dengan manajemen 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Penimbunan di TPA). Sampah dikumpulkan dari sumbernya kemudian diangkut ke TPS dan terakhir ditimbun di TPA, tetapi reduksi sampah dengan mengolah sampah untuk dimanfaatkan menjadi produk yang berguna perlu dipikirkan.

b. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu.

Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh SKPD yang terlibat di dalamnya.

c. Program

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, Pada Anggaran tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 121.780.545.000 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 9.126.850.000
2. Belanja Langsung = Rp. 112.653.695.000

Alokasi dan realisasi anggaran ini diselesaikan selama 1 tahun adapun program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 8 (delapan) Program dan 39 (Tiga puluh sembilan) kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.5

Tabel 5 Program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran
1	2	3	4

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	7.082.362.400
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp	1.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp	213.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp	2.045.000.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	140.604.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	10.000.000
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp	25.000.000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	25.000.000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	30.000.000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	8.000.000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	45.000.000
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	260.000.000
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	65.000.000
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp	4.209258.400
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	514.000.000
15	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl	Rp	500.000.000
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	14.000.000
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	150.000.000
17	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp	150.000.000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	5.000.000
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	5.000.000
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan	Rp	7.736.366.000
19	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp	3.621.061.000
20	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota	Rp	4.115.305.000
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	Rp	91.360.491.600

	Lingkungan Hidup		
21	Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp	133.000.000
22	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup	Rp	430.273.000
23	Koordinasi pengelolaan program LH (rakorda PPLH)	Rp	96.000.000
24	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Rp	85.680.000
25	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Rp	125.300.000
26	Pengawasan pengelolaan LB3	Rp	115.000.000
27	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Rp	110.500.000
28	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	132.867.600
29	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)	Rp	131.871.000
30	Penanaman di pesisir/pantai (DBH)	Rp	47.790.000.000
31	Penanaman bamboo kanan kiri sungai (DBH)	Rp	10.000.000.000
32	Pembibitan (DBH)	Rp	21.720.000.000
33	Penanaman di sepadan danau dan daerah tangkapan air (DBH)	Rp	10.420.000.000
VII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	416.006.000
34	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp	126.250.000
35	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp	112.100.000
37	Pekan lingkungan hidup	Rp	114.656.000
38	Penanganan Kasus LH	Rp	63.000.000
IX	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	5.389.469.000
39	Penataan RTH	Rp	2.024.779.000
40	Pemeliharaan RTH	Rp	3.364.690.000
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	112.653.695.000

Dari hasil evaluasi

terhadap pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2018, dengan sebesar Anggaran **Rp. 112.653.695.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 21.561.343.926** baik terhadap pengukuran indikator kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran dapat di laksanakan dengan baik. Untuk tahun 2018 ini ada penambahan anggaran dana DBH (Dana Reboisasi) sebesar Rp. 90.000.000.000 yang masuk dalam batang tubung anggaran DLHK, anggaran

tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal yaitu 4 kegiatan, maka realisasi keuangan DLHK hanya 19 % dari anggaran belanja langsung.

Dilihat dari pencapaian Program kegiatan yang terdapat pada tabel II.5 anggaran pada tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik, walaupun belum memenuhi target yang diharapkan.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, penetapan indicator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, Indikator Kinerja Utama ini merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2016 yang mencakup :

1. Terjaganya Kualitas air sungai
2. Terjaganya Kualitas Udara
3. Menurunnya Intensitas Emisi
4. Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani

Mempertahankan kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup sangat memengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi pertama yaitu “Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Terjaganya kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau)
- Terjaganya kualitas udara
- Menurunnya intensitas emisi
- Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangan

VISI: MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (satuan)	Kondisi awal	TARGET TAHUNAN					Target Akhir	
			2016	2017	2018	2019	2020		
Misi I : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan									
1 Mempertahankan kualitas lingkungan hidup									
1	Terjaganya kualitas air sungai	Tingkat pencemaran Kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau indek pencemaran/IP <5	3,71	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
2	Terjaganya kualitas udara	Indek standar pencemaran udara (ISPU < 100)	80,93	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
3	Menurunnya intensitas emisi	Jumlah Emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan (juta ton CO2 eq)	449.000 ton Co2 eq	442.000 ton Co2 eq	435.000 ton Co2 eq	428.000 ton Co2 eq	421.000 ton Co2 eq	414.000 ton Co2 eq	406.000 ton Co2 eq

4	Prosentase cakupan pelayanan / Prosentase volume sampah yang tertangani (persen)			37%	40%	42%	44%	46%	48 %
---	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	------

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja DLHK Kabupaten Berau adalah penjabara perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DLHK tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja (RENJA) DLHK Kabupaten Berau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Berau selama tahun lalu dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa Dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Rencana kinerja tahun 2018

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Program pelayanan adminitrasi perkantoran					
05						
01						
01	Penyedia jasa surat menyurat	Terkirimnya surat	Kab. Berau	1000 lbr	3.000.000	APBD
2						
05						
01						
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik,	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	Kab. Berau	4 jenis	250.000.000	APBD
2						
05						
01						
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya jasa peme liharaan dan perizinan	Kab. Berau	45 unit	2.000.000.000	APBD
2						
05						
01						
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium	Kab. Berau	12 org	200.000.000	APBD
2						
05						
01						
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan lingkungan perkantoran	Kab. Berau	5 buah	80.000.000	APBD

2	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya Peralatan kantor	Kab. Berau	30 unit	30.000.000	APBD
2	05	01	10	Penyediaan ATK	Tersedianya ATK sesuai kebutuhan	Kab. Berau	10 jenis	30.000.000	APBD
2	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpakainya barang cetakan	Kab. Berau	10 jenis	30.000.000	APBD
2	05	01	12	Penyediaan Komponen Intalasi	Tergantinya komponen	Kab. Berau	2 jenis	8.000.000	APBD
2	05	01	13	Listrik Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Berau	7 jenis	500.000.000	APBD
2	05	01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan	Tersedianya bacaan da Peraturan Per UU	Kab. Berau	5 majalah	30.000.000	APBD
2	05	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Terpenuhinya konsumsi keg. Rapat / Tamu	Kab. Berau	108 porsi	50.000.000	APBD
2	05	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi lintas sektor	Luar Kab. Berau	25 kali	300.000.000	APBD
2	05	01	19	Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi lintas sektor	Dlm Kab Berau	50 kali	100.000.000	APBD
2	05	01	20		Jumlah pegawai tidak	Kab. Berau	117 org	3.800.000.000	APBD

				Penyediaan Jasa Adminitrasi teknis perkantoran	tetap yang mendapatkan honor				
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
2	05	02	10	Pengadaan Mebeler	Tersedianya mebelair sesuai kebutuhan	Kab. Berau	3 jenis	50.000.000	APBD
2	05	02	22	Pemeliharaan rutin/gedung	Terjaganya gedung / ktr	Kab. Berau	4 unit	25.000.000	APBD
				Program peningkatan disiplin aparatur					
2	05	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan		Kab. Berau	150 stell	150.000.000	APBD
2	05	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu		Kab. Berau	116 stelll	60.000.000	APBD
				Program peningkatan kapasitas sumber dya aparatur					
2	05	05	.03	Bimbingan Teknis implementasi peraturan Undang-undang	Terlaksananya Bimtek Sumber Daya Aparatur	Kab. Berau	10 org	150.000.000	APBD
				Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
2	05	06	.01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja/SKPD	Tersusnya Laporan Kinerja SKPD	Kab. Berau	1 dok	10.000.000	APBD
2	05	06	.05	Sosialisasi kinerja program SKPD	Tersedianya pameran Pembangunan	Kab. Berau	1 kali	50.000.000	APBD

2	05	06	05	Monitoring, evaluasi dan laporan	Jumlah pelaksanaan monitoring	Kab. Berau	4 lokasi	150.000.000	APBD
				Program Pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan					
				Penyediaan perasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Kab. Berau			
2	05	15	02	Penanganan sampah pada permukaan jalan dan saluran Drainase kota	Terlaksananya penanganan sampah pada permukaan jalan dan drainase	Kab. Berau	3 unit	5.500.000.000	APBD
2	05	15	18	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH		Kab. Berau	80 org	2.344.000.000	APBD
2	05	16	.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Ketaatan perusahaan terhadap peraturan LH	Kab. Berau	28 perusahaan	200.000.000	APBD
2	05	16	.07	Pengkajian Dampak LH	Tersedianya informasi	Kab. Berau	100 dokumen	200.000.000	APBD
2	05	16	.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian LH	Tersedianya Data	Kab. Berau	1 kelompok	200.000.000	APBD
2	05	16	18	Koordinasi Pengelolaan Program LH (Rakorda PPLH)	Tersusunnya Program Pengelolaan LH	Kab. Berau	3 kali	200.000.000	APBD
2	05	16	21	Pemantauan Kerusakan LH	Jumlah perusahaan yang dipantau	Kab. Berau	4 kecamatan	200.000.000	APBD
2	05	16	22	Pengawasan dan Penataan izin lingkungan	Meningkatkan Penataan lingkungan	Kab. Berau	20 usaha/ Kegiatan	200.000.000	APBD
2	05	16	23	Pengawasan pengelolaan Limbah B3	Terkendalinya pengelolaan LB3	Kab Berau	24 Perusahaan	200.000.000	APBD

2	05	16	24	pemantauan kualitas air sungai	terpantaunya parameter air	Kab. Berau	3 sungai	200,000,000	APBD
2	05	16	26	Fasilitas Laboratorium LH	Jumlah parameter uji Lab	Kab. Berau	9 Parameter	200.000.000	APBD
2	05	16	29	Pemantauan evaluasi laporan Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersedianya laporan emisi (GRK)	Kab. Berau	414.000 ton Co2 eq	200.000.000	APBD
				Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam					
2	05	17	19	Identifikasi Data Kawasan Karst	Tersedianya Data kawasan Karst	Kab Berau	8,145 Ha	200.000.000	APBD
2	05	17	18	Konservasi Penyu	Luas perlindungan dan pengawasan penyu	Kab. Berau	2 Kecamatan	200.000.000	APBD
2	05	17	20	Pelindungan dan pengawasan kawasan hutan	Terlindunginya kawasan hutan KBNK	Kab. Berau	1 lokasi	200.000.000	APBD
				Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup					
2	05	19	.01	Peningkatan Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terbinanya sekolah Adiwiyata	Sekolah	2 Sekolah	200.000.000	APBD
2	05	19	.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersusunnya Buku Laporan SLHD	Kab. Berau	1 Dokumen	200.000.000	APBD

2	05	19	.07	Peringatan hari lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan Hari Lingkungan Hidup	Kab. Bearu dan luar Kab. Berau	2 Even	200.000.000	APBD
2	05	19	.08	Penanganan Kasus Lingkungan	Tertanganinya dugaan kasus LH	Kab. Bearu	5 kasus	200.000.000	APBD
				Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					
2	05	24	.05	Penataan RTH	Terlaksananya penataan RTH	Kab. Berau	5 lokasi	1.388.940.000	APBD
2	05	24	.05	Pemeliharaan RTH	terpeliharannya RTH	Kab. Berau	4 kecamatan	2.890.734.400	APBD

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemilik instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atasan kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Berau, perjanjian kinerja kepala DLHK di tanda tangani oleh Bupati Berau, eselon III ditandatangani oleh eselon II, eselon IV ditandatangani oleh eselon III dan untuk pelaksana ditandatangani oleh eselon IV.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

()

()

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Eselon

NO	Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1			
2			
3			

Program Kegiatan

Anggaran

1.

Rp. -

2.

Rp. -

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa Dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan kinerja tahun lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja tahun lalu	Realisasi tahun 2018
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sungai segah, sungai Kelay, sungai berau IP<5	1<IP<5 Cemar Ringan 4,4	1<IP<5 Cemar Ringan 2,7
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	50.55	29,9
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO ₂ eq)	435.000	424.845
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	85 %	85

Pada tabel diatas sasaran terjaganya kualitas air sunagi antara Kinerja tahun lalu dan realisasi masih dalam batas target yaitu di atas satu dibawah lima ini merupakan cemar ringan, sedangkan nilai untuk kinerja tahun lalu 4,4 cemar ringan sedangkan realisasi tahun 2018 ini 2,7 cemar ringan, masih sesuai dengan target. Sedangkan untuk sasaran

terjaganya kualitas udara target 50,5 sedangkan hasil yang telah dilakukan pada tahun 2018 dengan nilai 29,9

dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara kinerja tahun lalu dan realisasi mengalami perbedaan yaitu 435.000 kinerja tahun lalu sedangkan realisasinya pada tahun 2018 adalah 424.845 dalam target intensitas emisi setiap tahunnya harus turun. sedangkan untuk capaian Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 85 %

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian indikator Kinerja Utama tahun 2018 merupakan penilaian beberapa indikator kinerja sasaran utama yang telah ditetapkan dalam program kegiatan yaitu :

Indikator Kinerja Sasaran target dan realisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sungai segah, sungai Kelay, sungai berau IP<5	<5	1<IP<5 Cemar ringan 2.75
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	29.9
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO ₂ eq)	428.000	424.845
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	40 %	85 %

Pada tabel diatas sasaran terjaganya kualitas air sunagi antara target dan realisasi masih dalam batas target yaitu di atas satu dibawah lima (<5) sedangkan realisasi pada tahun 2018 dengan nilai 2,27 ini merupakan cemar ringan. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara yang targetnya < 100, sedangkan realisasi pengambilan sampling dengan nilai 29.9 masih dibawah target dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara target dan realisasi mengalami penurunan emisi 3.154,883 ton Co2-eq sehingga target emisi 428.000 ton Co2-eq turun menjadi menjadi 424.845 ton Co2-eq, sedangkan untuk capaian Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 85 %

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan kinerja tahun lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja tahun lalu	Realisasi tahun 2018
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sunbgai segah, sungai Kelay, sungai berau IP<5	1<IP<5 Cemar Ringan 4,4	1<IP<5 Cemar Ringan 2,7
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	50.55	29,9
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	435.000	424.845
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	85 %	85

Pada tabel diatas sasaran terjaganya kualitas air sunagi antara Kinerja tahun lalu dan realisasi masih dalam batas target yaitu di atas satu dibawah lima ini merupakan cemar ringan, sedangkan nilai untuk kinerja tahun lalu 4,4 cemar ringan sedangkan realisasi tahun ini 2,7 cemar ringan, masih sesuai dengan target. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara target 50,5 sedangkan hasil yang telah dilakukan pada tahun 2018 dengan nilai 29,9

dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara kinerja tahun lalu dan realisasi mengalami perbedaan yaitu 435.000 ton Co2-eq kinerja tahun lalu sedangkan realisasinya tahun 2018 realisasinya 424.845 ton Co2-eq dalam target intensitas emisi setiap tahunnya harus turun tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan. sedangkan untuk capaian Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 85 %

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sunbgai segar, sungai Kelay, sungai berau IP<5	<5	1<IP<5 Cemar ringan, 2,7
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	29,9
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	428.000	424.845
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	40 %	85 %

Pada tabel diatas sasaran terjaganya kualitas air sunagi antara target RPJMD dan realisasi masih dalam batas target yaitu < 5 ini merupakan cemar ringan dengan nilai 2,7. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara untuk target RPJMD Kurang dari seratus (<100) sedangkah hasil dari pemantauan kualitas Udara adalah 29.9 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara target dan realisasi mengalami kenaikan dengan 762.591 disebabkan antara bukaan lahan belum seimbang dengan penanaman lahan maka tidak sesuai dengan target RPJMD yang ada. sedangkan untuk

capaian Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 85%

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pada capaian kinerja pada tahun 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terutama pada target RPJMD dan Renstra ada kegiatan yang mengalami kenaikan target yang ada untuk keberhasilan terutama dukungan dari dana, sumber daya manusia, dan kerjasama antar instansi yang terkait. begitu juga sebaliknya kegagalan disebabkan oleh dana untuk melakukan pengukuran hasil sampling, sumber daya manusia untuk melakukan pengujian sampling, dan kurangnya informasi dari instansi yang terkait masalah lingkungan.

3.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan

Pada tabel sasaran terjaganya kualitas air sunagi antara target RPJMD dan realisasi masih dalam batas target yaitu < 5 ini merupakan cemar ringan dengan nilai 2,7. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara untuk target RPJMD Kurang dari seratus (<100) sedangkan hasil dari pemantauan kualitas Udara adalah 29.9 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara target dan realisasi mengalami kenaikan dengan 762.591 disebabkan antara bukaan lahan belum seimbang dengan penutupan lahan maka tidak sesuai dengan target RPJMD yang ada. sedangkan untuk capaian Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 85 %

Indikator Kinerja Sasaran target dan realisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sungai segah, sungai Kelay, sungai berau IP<5	<5	1<IP<5 Cemar ringan 2.75
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	29.9
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	428.000	424.845

4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	40 %	85 %
---	---	---	------	------

3.3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun lalu dan kinerja tahun ini

Pada tabel sasaran terjaganya kualitas air sunagi antara Kinerja tahun lalu dan realisasi masih dalam batas target yaitu di atas satu dibawah lima ini merupakan cemar ringan, sedangkan nilai untuk kinerja tahun lalu 4,4 cemar ringan sedangkan realisasi tahun ini 2,7 cemar ringan, masih sesuai dengan target. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara tahun lalu dengan nilai 50,5 sedangkan hasil yang telah dilakukan pada tahun 2018 dengan nilai 29,9 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara kinerja tahun lalu dan realisasi mengalami perbedaan yaitu 435.000 kinerja tahun lalu sedangkan realisasinya 762.591 dalam target intensitas emisi setiap tahunnya harus turun tetapi pada tahun 2018

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan kinerja tahun lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja tahun lalu	Realisasi tahun 2018
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sunbgai segah, sungai Kelay, sungai berau IP<5	1<IP<5 Cemar Ringan 4,4	1<IP<5 Cemar Ringan 2,7
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	50.55	29,9
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	435.000	424.845

4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	85 %	85
---	---	---	------	----

3.3.3 Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Strategis Organisasi

Program/kegiatan yang selama ini berjalan tahun 2018 pencapaian target yang telah di tetapkan dalam dokumen strategis sudah dapat berjalan sesuai dengan target tetapi masih ada yang melebihi target. Pada tabel sasaran terjaganya kualitas air sunagi antara target RPJMD dan realisasi masih dalam batas target yaitu < 5 ini merupakan cemar ringan dengan nilai 2,7. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara untuk target RPJMD Kurang dari seratus (<100) sedangkan hasil dari pemantauan kualitas Udara adalah 29.9 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara target dan realisasi mengalami penurunan dengan 424.845 disebabkan antara bukaan lahan belum seimbang dengan penutupan lahan maka tidak sesuai dengan target RPJMD yang ada. sedangkan untuk capaian Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 85 %

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sunbgai segah, sungai Kelay, sungai berau IP<5	<5	1<IP<5 Cemar ringan, 2,7

2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	29,9
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	428.000	424.845
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	40 %	85 %

3.3.4 Analisa penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja yang telah dilakukan

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dengan program yang dilaksanakan sudah sesuai tetapi ada beberapa kendala yaitu : dalam pengambilan sample udara dan hasil masih dari laporan DLH provinsi Kalimantan Timur serta dalam penghitungan emisi karbon masih menggunakan pihak NGO. Sedangkan keberhasilan yaitu kita masih dapat melakukan kegiatan sesuai dengan target yang diinginkan.

3.3.5 Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil berjumlah 80 orang, dimana 66 orang diantaranya adalah laki – laki dan 14 orang diantaranya perempuan. Penggunaan sumber daya manusia untuk dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan memang masih kekurangan tenaga kerja sehingga untuk mengefisienkan dengan cara merangkap – rangkap pekerjaan agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan.

3.3.6 Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, maka ditetapkan program dan kegiatan pada tahun 2018 yaitu 8 (delapan) Program dan 39 (Tiga puluh sembilan) kegiatan sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel realisasi program/kegiatan Anggaran belanja langsung

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	7.082.362.400	6.434.057.639	
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp	1.500.000	1.500.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp	213.000.000	165.723.120	77
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp	2.045.000.000	1.863.734.403	91
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	140.604.000	129.148.000	91
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	10.000.000	9.229.200	92
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp	25.000.000	24.848.000.	99
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	25.000.000	13.670.000	54
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	30.000.000	21.938.400	73
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	8.000.000	5.877.000	73
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000	4.955.000	99
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	45.000.000	25.214.900	56
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	260.000.000	255.891.800	98
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	65.000.000	64.632.000	99
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp	4.209258.400	4.137.331.150	98

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	514.000.000	441.925.400	
15	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl	Rp	500.000.000	431.660.000	86
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	14.000.000	10.265.400	73
III	Program peningkatan disiplin aparat	Rp	150.000.000	144.150.000	
17	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp	150.000.000	144.150.000	96
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	5.000.000	4.970.000	
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	5.000.000	4.970.000	99
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan	Rp	7.736.366.000	7.102.557.150	
19	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp	3.621.061.000	3.326.447.650	91
20	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota	Rp	4.115.305.000	3.776.109.500	91
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	91.360.491.600	1.635.154.691	
21	Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp	133.000.000	120.112.782	90
22	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup	Rp	430.273.000	369.815.000	85
23	Koordinasi pengelolaan program LH (rakorda PPLH)	Rp	96.000.000	95.940.000	99
24	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Rp	85.680.000	79.201.600	92
25	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Rp	125.300.000	122.158.510	97
26	Pengawasan pengelolaan LB3	Rp	115.000.000	64.343.021	55
27	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Rp	110.500.000	102.942.900	93
28	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	132.867.600	99.734.226	75
29	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)	Rp	131.871.000	123.256.969	93
30	Penanaman di pesisir/pantai (DBH)	Rp	47.790.000.000	0	0
31	Penanaman bamboo kanan kiri sungai (DBH)	Rp	10.000.000.000	85.216.000	0,8
32	Pembibitan (DBH)	Rp	21.720.000.000	155.814.368	0,7
33	Penanaman di sepadan danau	Rp	10.420.000.000	216.619.315	2,07

	dan daerah tangkapan air (DBH)				
VII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	416.006.000	377.150.425	
34	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp	126.250.000	100.267.325	79
35	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp	112.100.000	106.070.800	94
37	Pekan lingkungan hidup	Rp	114.656.000	114.143.000	99
38	Penanganan Kasus LH	Rp	63.000.000	56.669.300	90
IX	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	5.389.469.000	5.131.443.287	
39	Penataan RTH	Rp	2.024.779.000	1.869.205.235	92
40	Pemeliharaan RTH	Rp	3.364.690.000	3.262.238.052	96
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	112.653.695.000	21.561.343.926	

Dari hasil analisa terhadap pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2018, dengan sebesar Anggaran **Rp. 112.653.695.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 21.561.343.926** baik terhadap pengukuran indikator kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran dapat di laksanakan dengan baik. Untuk tahun 2018 ini ada penambahan anggaran dana DBH (Dana Reboisasi) sebesar Rp. 90.000.000.000 yang masuk dalam batang tubung anggaran DLHK, anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal disebabkan kendala teknis dan non teknis, terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu Kegiatan penanaman di pesisir, kegiatan penanaman bambu kiri kanan sungai, pembibitan, penanaman di sempadan danau dan daerah tangkapan air. yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) DR, anggaran tersebut masuk dalam batang tubuh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2018. kegiatan DBH DR dilakukan pembahasan dengan kementerian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait isi DPA (DBH) DR maka dana tersebut belum dapat digunakan serta ada kegiatan yang tidak di setujui untuk dilaksanakan kemudian juga terkendala masalah pelelangan tidak tercukupya waktu, serta lokasi penanaman. maka realisasi keuangan DLHK hanya 19 % dari anggaran belanja langsung.

3.4 Realisasi Anggaran

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, Pada Anggaran tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 121.780.545.000 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 9.126.850.000
2. Belanja Langsung = Rp. 112.653.695.000

Alokasi dan realisasi anggaran ini diselesaikan selama 1 tahun adapun program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 8 (delapan) Program dan 39 (Tiga puluh sembilan) kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel

Belanja Tidak Langsung

No	uraian	Anggaran		Capaian %
		target	Realisasi	
1	Belanja tidak langsung	9.126.850.000	7.965.535.021	87

Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2018 dengan rata-rata serapan realisasi keuangan sebesar 87 % jika diukur dengan skala penilaian maka untuk realisasi belanja tidak langsung pada skala nilai 80 > 100 kategori penilaian baik

Belanja langsung

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	7.082.362.400	6.434.057.639	
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp	1.500.000	1.500.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp	213.000.000	165.723.120	77
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp	2.045.000.000	1.863.734.403	91
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	140.604.000	129.148.000	91
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	10.000.000	9.229.200	92
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp	25.000.000	24.848.000.	99
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	25.000.000	13.670.000	54
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	30.000.000	21.938.400	73
9	Penyediaan Komponen Instalasi	Rp	8.000.000	5.877.000	73

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000	4.955.000	99
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	45.000.000	25.214.900	56
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	260.000.000	255.891.800	98
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	65.000.000	64.632.000	99
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp	4.209258.400	4.137.331.150	98
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	514.000.000	441.925.400	
15	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl	Rp	500.000.000	431.660.000	86
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	14.000.000	10.265.400	73
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	150.000.000	144.150.000	
17	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp	150.000.000	144.150.000	96
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	5.000.000	4.970.000	
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	5.000.000	4.970.000	99
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan	Rp	7.736.366.000	7.102.557.150	
19	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp	3.621.061.000	3.326.447.650	91
20	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota	Rp	4.115.305.000	3.776.109.500	91
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	91.360.491.600	1.635.154.691	
21	Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp	133.000.000	120.112.782	90
22	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup	Rp	430.273.000	369.815.000	85
23	Koordinasi pengelolaan program LH (rakorda PPLH)	Rp	96.000.000	95.940.000	99
24	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Rp	85.680.000	79.201.600	92
25	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Rp	125.300.000	122.158.510	97
26	Pengawasan pengelolaan LB3	Rp	115.000.000	64.343.021	55

27	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Rp	110.500.000	102.942.900	93
28	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	132.867.600	99.734.226	75
29	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)	Rp	131.871.000	123.256.969	93
30	Penanaman di pesisir/pantai (DBH)	Rp	47.790.000.000	0	0
31	Penanaman bamboo kanan kiri sungai (DBH)	Rp	10.000.000.000	85.216.000	0,8
32	Pembibitan (DBH)	Rp	21.720.000.000	155.814.368	0,7
33	Penanaman di sepadan danau dan daerah tangkapan air (DBH)	Rp	10.420.000.000	216.619.315	2,07
VII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	416.006.000	377.150.425	
34	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp	126.250.000	100.267.325	79
35	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp	112.100.000	106.070.800	94
37	Pekan lingkungan hidup	Rp	114.656.000	114.143.000	99
38	Penanganan Kasus LH	Rp	63.000.000	56.669.300	90
IX	Program Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	5.389.469.000	5.131.443.287	
39	Penataan RTH	Rp	2.024.779.000	1.869.205.235	92
40	Pemeliharaan RTH	Rp	3.364.690.000	3.262.238.052	96
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	112.653.695.000	21.561.343.926	

Realisasi belanja langsung pada tahun 2018 dengan rata-rata serapan realisasi fisik sebesar 69 % sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 19 %, jika diukur dengan sekala penilaian maka untuk realisasi fisik belanja langsung pada sekala nilai 60 > 80 kategori penilaian cukup sedangkan untuk realisasi keuangan belanja langsung pada sekala nilai < 55 kategori penilaian kurang, secara keseluruhan penilaian sudah dianggap baik karena pelaksanaan semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, yang menjadi permasalahan penyerapan anggaran keuangan dan fisik untuk kegiatan yang berasal dari dana (DBH) DR tidak dapat dilaksanakan keseluruhan sebab dana tersebut masuk pada semester dua dan akan dilakukan pembahasan dengan kementerian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait isi DPA (DBH) DR maka dana tersebut belum dapat digunakan serta ada kegiatan yang

tidak di setujui untuk dilaksanakan kemudian juga terkendala masalah pelelangan serta lokasi penanaman.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau ini disusun masih mengacu pada peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj-IP tahun 2018 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut:

1. Beberapa indikator baik input, proses output, Masih ada yang sarasanya belum memenuhi target . Untuk selanjutnya target yang dicapai untuk setiap tahunnya akan diperbaiki sehingga tercapainya target yang diinginkan.
2. Untuk Indikator Kinerja yang telah dilakukan akan lebih ditingkatkan lagi sehingga hasilnya tidak melebihi target yang ada dalam dokumen Restra.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Clean Government dalam rangka mewujudkan Good Governance, sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dan dapat di pertanggungjawabkan atau dapat menjadi umpan balik bagi stakeholder (pihak – pihak yang berkepentingan)..

Tanjung Redeb, Januari 2019

LAMPIRAN

IKHSTIAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

LKJ-IP ini disusun sebagai tindaklanjut dari menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah. Peraturan menteri tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi. Dan peraturan presiden republic Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat laporan kinerja pemerintah SKPD

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Secara umum berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dapat terlaksana dengan baik namun disadari masih banyak hal yang harus di tingkatkan seperti administrasi yang di luar kendali Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Personil yang belum memadai, Penerapan aturan yang kadang tidak sepaham antara pemangku kepentingan dengan OPD pelaksana

Dengan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diharapkan LKJ-IP ini akan dapat memenuhi unsur – unsur yang dipersyaratkan